

**ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA  
DI DESA WISATA JATIREJO, KECAMATAN GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG**

Fahad Mursyid Jannata, Aufarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telpon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

*ABSTRACT*

*Development is not only in the infrastructure sector, but also in various fields including tourism. One of the tourism destinations in Semarang City is the Jatirejo Tourism Village. In the beginning, the management of this tourist village was quite good, but as the years goes by, it is safe to say that the management weren't as optimal as it should be. This is caused by weak coordination between tourism stakeholders for synchronization and harmonization. This research aims to identify stakeholders in policy implementation, identify stakeholders in tourism development, analyze the role of stakeholders, and analyze supporting and inhibiting factors in tourism development in Jatirejo Tourism Village. This research conducted by qualitative descriptive method by collecting data through observation, interviews and documentation. The result of the research shows that the stakeholders in implementing the Pentahelix-shaped policy consist of academics, by Kedaireka Team; from the private sector, represented by BNI; from the community, involving Pokdarwis Jatirejo, Karang Taruna Jatirejo, PKK Jatirejo, KTT "Sido Makmur", KWT Jatirejo Village, and UMKM Ala Siranda; from the government, including Mayor of Semarang, Disbudpar, Jatirejo Subdistrict, Bapeda, Dispertan, DinkopUM, Dishanpan, Dinkes, and Disperkim; also from the mass media, represented by Radar Semarang. The identification of stakeholders based on influence and interests is divided into primary, secondary and tertiary stakeholders, whereas for quarterly there were no such stakeholders. In addition, the role of stakeholders consists of policy creator, coordinator, facilitator, implementor and accelerator. Also in tourism development, there are supporting and inhibiting factors originating from indicators of values, communication, trust and policy. Stakeholders are expected to improve relations of harmony and synchronism, stakeholders can carry out their respective duties and functions optimally. It is expected that community awareness and concern for the tourist village increasing gradually also restructurisation and reorganization of Jatirejo Pokdarwis' Management.*

*Keywords: Stakeholders Role, Tourism Development, Pentahelix.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan di desa merupakan suatu langkah dalam berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa cukup mempunyai peran yang besar terhadap negara karena dapat menjadi suatu pekerjaan proyek nasional. Campur tangan pemerintah tentu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan dari pembangunan desa (Hariyanto, 2020).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembangunan di desa bukan hanya bidang infrastruktur saja, namun mencakup berbagai bidang dan sektor seperti pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta bidang yang tidak kalah penting yaitu pembangunan di sektor pariwisata. Dimana pariwisata adalah kunci pembangunan, kesejahteraan, dan kebahagiaan (Salsabila, 2018).

Pariwisata telah tumbuh menjadi sektor yang cukup dominan sehingga akan memberikan keuntungan dan memiliki prospek masa depan yang cerah terhadap sebuah pembangunan (Nugraha, 2020). Karena dengan melakukan pembangunan pariwisata maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan kesempatan

berwirausaha, serta yang paling utama yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap budaya dan kearifan lokal dari budaya setempat terhadap masyarakat maupun bagi wisatawan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada beberapa tahun terakhir dunia diguncang dengan adanya pandemi virus Covid-19. Virus tersebut telah menyerang seluruh sendi kehidupan manusia tak terkecuali sektor pariwisata. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Pariwisata terus melakukan pengembangan pada sektor pariwisata. Walaupun begitu, sektor pariwisata tetap mampu konsisten dan bertahan hingga saat ini seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Kunjungan Wisatawan Indonesia Tahun 2021/2022

No	Bulan	Jumlah
1	Februari	115.765.000
2	Maret	130.993.000
3	April	125.001.000
4	Mei	152.604.000
5	Juni	137.247.000
6	Juli	135.438.000
7	Agustus	124.751.000
8	September	124.071.000
9	Oktober	148.645.000
10	November	150.577.000
11	Desember	163.619.000
12	Januari	143.744.000

Sumber: (BPS, 2021)

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai keanekaragaman pariwisatanya mulai dari wisata buatan, wisata religi maupun wisata alam. Pada

masa pasca pandemi Covid-19, pariwisata di Jawa Tengah terjadi peningkatan kunjungan wisatawan hingga bahkan surplus. Dari target 11 juta wisatawan nusantara, realisasi hingga Agustus 2022 mencapai 26 juta wisatawan nusantara (Jatengprov.go.id. 2022. “Kunjungan Wisatawan Nusantara di Jateng Lebih Target”).

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa potensi wisata yang menjanjikan dengan berbagai fasilitas penunjang seperti pelabuhan, jalan tol, bandara, dan lainnya. Pada mulanya, kota Semarang terkenal dengan kota dagang. Namun dengan seiring berjalannya waktu, Kota Semarang berubah menjadi Kota Pariwisata dengan menawarkan bermacam – macam daya tarik wisata. Wisata tersebut seperti bangunan sejarah, desa wisata, keragaman etnis dan budaya, serta tradisi kebiasaan masyarakat Kota Semarang.

Tabel 2. Data Wisatawan Kota Semarang Tahun 2016 - 2022

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik
2016	56.192	4.627.782
2017	99.282	4.198.584
2018	66.107	5.703.282
2019	81.999	7.150.343
2020	6.628	3.260.303
2021	77	2.670.281
2022	2.355	3.640.591

Sumber: Buku Statistik Disporapar Jawa Tengah tahun 2022

Saat ini, Kota Semarang gencar untuk mengembangkan pada sektor pariwisatanya. Pengembangan kepariwisataan terlihat dari upaya pemerintah Kota Semarang dengan menuangkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015- 2025. Hal ini karena Kota Semarang kaya akan destinasi dan potensi wisata yang menarik salah satunya yaitu desa wisata.

Desa wisata merupakan suatu kawasan yang terdapat di daerah perdesaan dengan menawarkan keseluruhan suasana yang menggambarkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan ekonomi, sosial, lingkungan, sosial budaya, adat istiadat, keseharian dan lain sebagainya yang mampu dikembangkan sebagai objek pariwisata (Hadiwijoyo dalam Herdiana, 2019).

Salah satu obyek pariwisata yang cukup terkenal di daerah Kota Semarang yaitu Desa Wisata Jatirejo. Desa Wisata Jatirejo terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Melihat bahwasannya Desa Jatirejo merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengrajin dan pengolah kolang–kaling terbesar di Kota Semarang, sehingga membuat daerah ini mempunyai daya tarik serta potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Adapun dinas terkait yang dapat membantu pengembangan wisata tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang. Dalam keberjalanan Desa Wisata ini, Disbudpar Kota Semarang masih perlu banyak berkontribusi secara nyata dalam mengembangkan daerah pariwisata agar dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakatnya.

Namun, dalam pengembangannya belum ada peningkatan yang maksimal pada desa wisata tersebut. Semakin bertambahnya tahun, pengelolaan desa wisata mengenai potensi pengolahan kolang-kaling, pengolahan kekayaan alam, wisata *river tubing*, *adventure trail*, dan bumi perkemahan dapat dikatakan belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan desa wisata pasca pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung karena kurangnya minat dan pengetahuan dari wisatawan.

Belum optimalnya pengelolaan desa wisata pasca pandemi Covid-19 tersebut disebabkan karena lemahnya koordinasi antar *stakeholders* pariwisata guna sinkronasi dan harmonisasi dalam pembangunan dan pengembangan urusan kepariwisataan multi level. *Stakeholders* adalah sekelompok atau person atau institusi lembaga yang memiliki kontribusi

peran dalam proses pembuatan keputusan serta penentuan kebijakan.

*Stakeholders* yang dimaksud meliputi 5 pilar utama, yakni adalah: Akademisi (*Academici*), Pemerintah (*Government*), Swasta (*Business*), Masyarakat (*Community*), dan Media Massa. 5 pilar tersebut dikenal dengan Teori *Pentahelix*. Teori *pentahelix* dikenal dapat mempercepat pengembangan potensi pariwisata khususnya dalam pengembangan desa wisata di Indonesia (Novianti, 2020).

Pasca pandemi Covid-19, Desa Wisata Jatirejo baru mencatatkan kunjungan wisatawan sebanyak 313 orang dalam kurun waktu 3 bulan yaitu pada Bulan Desember tahun 2022 sampai dengan Bulan Februari tahun 2023 (Data Olahan Peneliti Pra Penelitian, 13 Februari 2023). Catatan kunjungan wisatawan sebanyak 313 orang itupun muncul dari adanya atraksi wisata baru di lokasi tersebut yang bernama *Green Fresh Farm* (GFF) yang kebetulan berada di RW 01.

Tabel 3. Data Kunjungan Wisata di Desa Wisata Jatirejo

No	Bulan	Tahun	Jumlah Kunjungan
1	Desember	2022	144
2	Januari	2023	130
3	Februari	2023	39
Total			313

Sumber: Data Olahan Pra Penelitian (2023)

*Stakeholders* berperan penting dalam pengembangan di Desa Wisata Jatirejo, jika koordinasi *stakeholders* tidak dapat berjalan dengan baik maka pengembangan pariwisata kurang berjalan dengan maksimal atau tidak berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan seperti terhambatnya pembangunan. *Stakeholders* memiliki peranan penting dalam pengembangan pariwisata, tanpa adanya peran dari *stakeholders* setempat, pengembangan pariwisata di daerah tidak dapat berjalan dengan maksimal (Ginting, 2019).

“Keterlibatan peran *stakeholders* menghasilkan perencanaan strategi pariwisata yang diterima dengan baik, menghindari konflik yang timbul selama implementasi kebijakan dan menyatukan mereka yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pariwisata” (Wanner, 2019). Oleh karena itu, peneliti akan mengambil judul penelitian yaitu **“Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *stakeholders* dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?

2. Bagaimana identifikasi *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?
3. Bagaimana peran dari masing – masing *stakeholders* dalam usaha pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat *stakeholders* dalam usaha pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi *stakeholders* dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis peran dari masing – masing *stakeholders* dalam usaha pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
4. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat *stakeholders* dalam usaha pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

## **D. Kajian Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Nicholas Henry (dalam Keban, 2008) menyatakan bahwa administrasi publik sebagai suatu langkah guna menggambarkan tentang hubungan atasan (pemerintah) dengan bawahan (masyarakat) dengan upaya agar pemerintah lebih memperhatikan permasalahan sosial yang sedang terjadi. Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008) adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dan penyatuan segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang bertujuan mempermudah pemimpin dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan administrasi publik dari berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu langkah proses atau program yang di implementasikan oleh penguasa pemerintahan yang berupaya pengelolaan dan pengkoordinasian sumberdaya yang tersedia dengan cara mememanajemennya dari awal hingga akhir guna mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

### **2. Kebijakan Publik**

Easton dalam Dunn (2012) memaparkan pengertian kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*” yang berarti sebagai pemberlakuan nilai/pandangan dengan memaksa kepada seluruh orang.

Thomas R Dye seperti yang telah dikutip oleh Islamy (2009: 19) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “*is whatever government choose to do or not to do*” yang artinya segala pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan.

Dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan sekumpulan tindakan yang baik dikerjakan oleh pemerintah maupun tidak kerjakan oleh pemerintah yang mana mempunyai suatu tujuan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah publik atau bertujuan kepentingan publik.

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2005) memberikan pendapat bahwa implementasi merupakan apapun yang terjadi setelah peraturan kebijakan publik telah diputuskan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2005) juga telah menjelaskan pengertian tentang implementasi kebijakan publik yaitu segenap tindakan yang dilakukan dari semua keputusan yang telah di susun sebelumnya.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah segala proses kegiatan yang dilaksanakan oleh aktor dengan maksud mencapai tujuan kebijakan publik.

Menurut Arif Yahya (dalam Tri Yuningsih, 2019) di dalam implementasi kebijakan publik terdapat suatu model analisis yaitu Model *Pentahelix*. Adapun kelima unsur tersebut yaitu *Academician, Business, Community, Government dan Media*. Kelima unsur tersebut sering disingkat di kalangan administrator dengan singkatan ABCGM.

#### 4. Stakeholders (Aktor Kebijakan)

*Stakeholders* merupakan suatu individu maupun kelompok yang dapat memberikan pengaruh atau diberi pengaruh di dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan (Fifiyanti, 2021). Menurut Howlett dan M. Ramesh (dalam Suwitri (2011), kebijakan adalah sub sistem kebijakan yang termasuk kedalam jejaring kebijakan antara sistem organisasi internasional, organisasi masyarakat, dan organisasi negara. Dalam menganalisis *stakeholders* terdapat beberapa tahap yaitu:

1. Tingkat Ketertarikan *Stakeholder*

2. Pengaruh dan Kepentingan

*Stakeholders*

3. Identifikasi *Stakeholders*

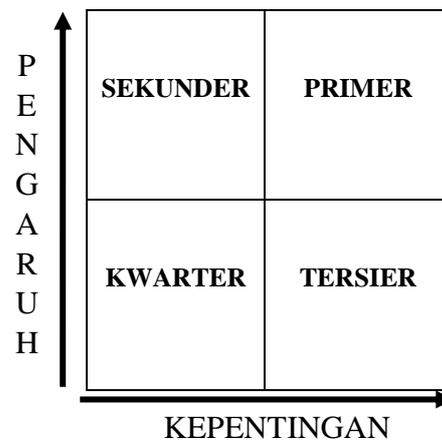
Mengacu pada pendapat Viney (dalam Suwitri, 2011), aktor atau *stakeholders* dapat dipilah ke dalam 4 kategori yaitu

a. Primer: *stakeholders* dengan pengaruh dan kepentingan yang tinggi.

b. Sekunder: *stakeholders* dengan pengaruh yang tinggi tetapi kepentingannya rendah.

c. Tersier: *stakeholders* dengan pengaruhnya rendah tetapi memiliki kepentingan tinggi.

d. Kwartir: *stakeholders* dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah.



Gambar 1. Kuadran Identifikasi *Stakeholders*

Sumber: Diolah Penulis (2023)

Selanjutnya dalam menganalisis apa saja peran aktor, maka menurut Nugroho (dalam Handayani, 2017) peran aktor diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

1. Pembuat Kebijakan (*Policy Creator*) ialah pemangku kepentingan yang berfungsi selaku pengambil keputusan serta penentu suatu kebijakan.

2. Koordinator (*Coordinator*) ialah pemangku kepentingan yang berfungsi mengkoordinasikan pemangku kepentingan terkait lainnya.

3. Fasilitator (*Facilitator*) ialah pemangku kepentingan yang berfungsi untuk mawadahi serta memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.
4. Pelaksana (*Implementor*) ialah pemangku kepentingan yang melakukan kebijakan termasuk kelompok sasaran.
5. Akselerator (*Accelerator*) ialah pemangku kepentingan yang berfungsi dalam percepatan serta berkontribusi supaya program bisa berjalan sesuai dengan tujuan.

## 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pariwisata

### 1. Nilai

Menurut Steeman (dalam Adisusilo, 2013: 56) adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, titik tolak, dan tujuan hidup. Indikator nilai meliputi nilai individu, nilai profesional, nilai organisasi, nilai legal, dan nilai kepentingan publik.

### 2. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan penyebaran informasi program yang akan dilakukan *stakeholders* untuk mencapai efisiensi pengembangan pariwisata. Indikator komunikasi meliputi pemahaman, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan.

### 3. Kepercayaan

Penelitian Waayers (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan

kolaborasi *stakeholders* bergantung pada hubungan yang saling percaya atau kepercayaan. Indikator kepercayaan meliputi kehandalan, kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas.

### 4. Kebijakan

Kebijakan digunakan untuk memantau keberjalanan pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo terdapat kebijakan yang melandasinya, yaitu Surat Keputusan Walikota Semarang No. 556/819 tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata Kota Semarang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball*. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan informan yang akan dipilih sesuai dengan tujuan tertentu dan mengetahui dengan benar masalah yang terkait. Selanjutnya, teknik *snowball* merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya dan dilakukan sampai seterusnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Stakeholder* dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis Kelurahan Jatirejo “Jati Langgeng”, *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo dapat diidentifikasi berdasarkan teori Pentahelix menurut Arif Yahya dalam (Tri Yuningsih, 2019). Dimana aktor yang terlibat dapat dibagi menjadi 5 golongan yaitu 1) Akademisi 2) Swasta 3) Masyarakat 4) Pemerintah 5) Media Massa. Dalam pengembangan pariwisata akan lebih optimal bila melibatkan kelima aktor tersebut sesuai dengan peran masing – masing.

*Stakeholders* yang pertama, akademisi yaitu dari Tim Pengabdian Masyarakat “Kedaireka” Universitas Katholik Soegijapranata Kota Semarang. *Stakeholders* yang kedua, swasta yaitu dari Bank Nasional Indonesia. *Stakeholders* yang ketiga, masyarakat yaitu dari Pokdarwis Jatirejo, Karang Taruna Kelurahan Jatirejo, Kelompok PKK Kelurahan Jatirejo, Kelompok Tani dan Ternak “Sido Makmur”, Kelompok Wanita Tani Kelurahan Jatirejo, dan UMKM Ala Siranda. *Stakeholders* yang keempat, pemerintah yaitu dari Walikota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kelurahan Jatirejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan

dan Dinas Perumahan dan Permukiman. *Stakeholders* yang kelima, media massa yaitu dari Jawa Pos Radar Semarang.



Gambar 2. *Stakeholders* dalam Kebijakan Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

### **B. *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo**

Pengembangan pariwisata menjadi salah satu proses dalam tahapan implementasi kebijakan. Dan di dalam proses pengembangan pariwisata juga memerlukan peran *stakeholders* sebagai subyek pelaksana dari implementasi kebijakan. Pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo ini melibatkan berbagai *stakeholders* yang terdiri dari berbagai sektor seperti sektor pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media massa.

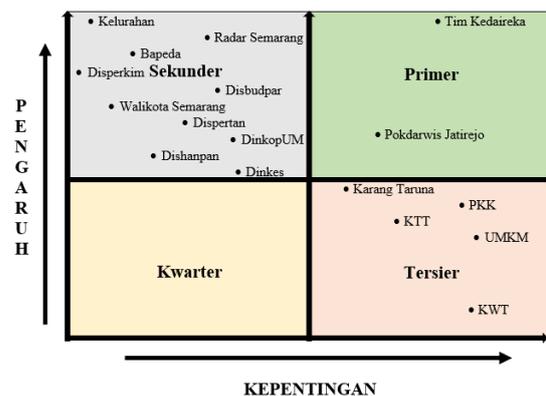
Dalam mengidentifikasi *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo yaitu dengan cara melihat besar pengaruh dan kepentingan. Adapun indikator yang dinilai

dalam besar pengaruh *stakeholders* yaitu dalam memberikan usulan, kontribusi fasilitas, kelembagaan yang terlibat, dukungan anggaran, dan kemampuan dalam mengembangkan. Selanjutnya indikator nilai yang dilihat dalam besar kepentingan stakholders yaitu dengan menganalisis keterlibatan, manfaat, kewenangan, skala prioritas, dan ketergantungan.

Adapun *Stakeholders* primer yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi yaitu Pokdarwis Kelurahan Jatirejo “Jati Langgeng” dan Tim Pengabdian Masyarakat “Kedaireka” Universitas Katholik Soegijapranata. Selanjutnya yang termasuk *stakeholders* sekunder dengan pengaruh tinggi namun kepentingannya rendah yaitu Walikota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Paiwisata Kota Semarang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, dan Kelurahan Jatirejo.

Selanjutnya *stakeholders* tersier dengan pengaruh rendah namun kepentingannya tinggi yaitu Karang Taruna Kelurahan Jatirejo, Kelompok PKK Kelurahan Jatirejo, Kelompok Tani dan Ternak “Sido Makmur”, Kelompok Wanita

Tani Kelurahan Jatirejo, UMKM Ala Siranda. Terakhir *stakeholders* kwarter memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah. Namun, peneliti tidak menemukan *stakeholders* yang termasuk kedalam kwarter.



Gambar 3. Identifikasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

### C. Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo

Keterlibatan *stakeholders* di dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi dari masing – masing *stakeholders* sangat menunjang dalam pengembangan pariwisata. Peran merupakan pengaruh yang diharapkan pada saat berhubungan interaksi sosial. Guna menganalisis suatu peran *stakeholders*, terdapat gejala yang dapat diamati melalui tugas, fungsi, serta kedudukan antar *stakeholders*. Berkaitan dengan hal itu, peneliti akan menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo.

Peran pertama yaitu *policy creator* terdiri dari Walikota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Peran kedua, *coordinator* terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Kelurahan Jatirejo, Pokdarwis Kelurahan Jatirejo “Jati Langgeng”, dan Tim Pengabdian Masyarakat “Kedaireka” Universitas Katholik Soegijapranata.

Peran ketiga, *facilitator* terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Semarang, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Kelurahan Jatirejo, Bank Nasional Indonesia, Pokdarwis Kelurahan Jatirejo “Jati Langgeng”, Karang Taruna Kelurahan Jatirejo, Kelompok PKK Kelurahan Jatirejo, Kelompok Tani dan Ternak “Sido Makmur”, Kelompok Wanita Tani Kelurahan Jatirejo, UMKM Ala Siranda, Tim Pengabdian Masyarakat “Kedaireka” Universitas Katholik Soegijapranata, dan Jawa Pos Radar Semarang.

Peran keempat *implementor* terdiri dari Pokdarwis Kelurahan Jatirejo “Jati Langgeng”, Karang Taruna Kelurahan

Jatirejo, Kelompok PKK Kelurahan Jatirejo, dan Tim Pengabdian Masyarakat “Kedaireka” Universitas Katholik Soegijapranata. Peran kelima, *accelerator* terdiri dari Kelurahan Jatirejo, Pokdarwis Kelurahan Jatirejo “Jati Langgeng”, Karang Taruna Kelurahan Jatirejo, Kelompok PKK Kelurahan Jatirejo, Tim Pengabdian Masyarakat “Kedaireka” Universitas Katholik Soegijapranata, dan Jawa Pos Radar Semarang.

#### **D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo**

Selanjutnya untuk faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo dari indikator nilai yaitu Lurah Jatirejo menerapkan konsep musyawarah bareng dan gotong royong untuk menciptakan *mindset* warga yang lebih baik, Lurah Jatirejo mampu menjadi perekat sehingga mampu menggerakkan masyarakat, Tim Kedaireka yang selalu sabar, ulet, dan gigih dalam melakukan pengabdian masyarakat, Karang Taruna Kelurahan Jatirejo yang siap dalam menyediakan sumber daya manusia, Kelompok PKK Kelurahan Jatirejo telah berusaha untuk menghidup – hidupkan organisasi UMKM serta membentuk UMKM yang terintegrasi menjadi satu organisasi.

Dari indikator komunikasi yaitu Pertemuan Forum Komunikasi yang

diadakan oleh pegiat pariwisata Kota Semarang dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berupa pembentukan “Si Barista” (Sinau Bareng Pariwisata) dengan intensitas pertemuan 3 bulan sekali, Komunikasi yang intens juga dilakukan oleh Lurah Jatirejo dengan selalu melibatkan serta menjalin komunikasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karang Taruna Kelurahan Jatirejo, dan Kelompok PKK Kelurahan Jatirejo, Peran kerjasama yang baik Lurah Jatirejo, Pokdarwis Jatirejo dan segenap kelompok masyarakat di Kelurahan Jatirejo telah berhasil memenangkan perlombaan Juara 2 Lomba Kampung Hebat tahun 2022, dan Banyak *stakeholders* yang memanfaatkan teknologi *whats app* dalam melakukan komunikasi.

Dari indikator kepercayaan yaitu Kepercayaan terbukti dari pelatihan – pelatihan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telah berhasil meningkatkan inovasi kuliner di Wisata Jatirejo, Tim Kedaireka dalam melakukan pengabdian masyarakat dan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo menggunakan partisipasi aktif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Tim Kedaireka juga mempercayakan kegiatan yang bersifat harus terjun langsung ke lapangan kepada tiga orang pemain kunci, kepercayaan juga terbangun berkat figur dan karakter dari

Ketua Pokdarwis yang dipercaya oleh masyarakat.

Dan dari indikator kebijakan yaitu Keberadaan kebijakan pengembangan pariwisata berupa Surat Keputusan Walikota Semarang No. 556/819 tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata Kota Semarang.

Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo dari indikator nilai yaitu Sumber daya manusia masyarakat itu sendiri yang kurang adanya minat dan keseriusan dalam mengelola pariwisata, Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo kurang bisa menyatu dan terkesan individualis, Kurang terlihatnya peran dari Ketua Pokdarwis dalam mengkoordinasikan kesemua kelompok masyarakat untuk bersatu dibawah naungan organisasi Pokdarwis Jatirejo, Kelurahan Jatirejo belum pernah melakukan restrukturisasi dan reorganisasi, Kurangnya profesionalisme dan kesolidan Karang Taruna Kelurahan Jatirejo, Perbedaan pemahaman masyarakat tentang pembangunan pavling jalan yang menuju Kreo.

Dari indikator komunikasi yaitu Kurangnya komunikasi kelurahan dan warga sehingga menyebabkan perbedaan pemahaman, Kurangnya komunikasi antar warga sehingga menyebabkan perbedaan pemahaman.

Dan dari indikator kepercayaan yaitu Permasalahan kepercayaan ini muncul karena kurangnya kepedulian dan dukungan dari masyarakat, Kualitas sumber daya manusia yang kadang minder dan kurang percaya diri, Kredibilitas atau keterpercayaan Pokdarwis Jatirejo terhadap Karang Taruna Kelurahan Jatirejo kurang, dan Kredibilitas atau keterpercayaan Pokdarwis Jatirejo terhadap Kelurahan Jatirejo juga kurang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, *stakeholders* dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo dengan model *Pentahelix*, terdiri dari lima *stakeholders* yaitu akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah, dan media massa. Selanjutnya identifikasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Jatirejo berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dianalisis lalu diklasifikasikan terdiri dari primer, sekunder, tersier, dan kwarter. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan *stakeholders* yang termasuk kedalam kwarter.

Selanjutnya Peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo diketahui dengan menganalisis tugas dan fungsi serta posisi dan kedudukan *stakeholders* tersebut.

Dalam hal ini, peran *stakeholders* diklasifikasikan menjadi *policy creator*, *coordinator*, *facilitator*, *implementor*, dan *accelerator*. Selanjutnya untuk faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo terdiri dari indikator nilai, komunikasi, kepercayaan dan kebijakan.

### **B. Saran**

Berikut merupakan saran yang dapat diberikan dalam memberikan masukan kepada *stakeholders* yang terkait guna pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo dapat berkembang secara optimal. Adapun saran tersebut yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan hubungan sinkronisme dan harmonisme, maka kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholders pentahelix* supaya dikuatkan dengan cara menambah intensitas pertemuan dan kegiatan bersama yang secara khusus membahas pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo.
2. Setiap *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo supaya menjalankan tugas pokok fungsi masing – masing *stakeholders* secara maksimal, sehingga pengembangan pariwisata dapat berkembang dengan optimal.
3. Adapun yang menjadi motor penggerak utama dalam Desa Wisata Jatirejo adalah Pokdarwis Jati

Langgeng. Oleh karena itu, masyarakat supaya musyawarah bersama guna melakukan restrukturisasi dan reorganisasi kepengurusan Pokdarwis Jatirejo, agar pariwisata di Desa Wisata Jatirejo dapat berjalan dengan maksimal.

4. Kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat maupun pemangku wilayah setempat supaya ditingkatkan kembali dengan cara menambah intensitas keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan sehingga dapat mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada di Desa Wisata Jatirejo.

## DAFTAR PUSTKA

### Buku

- Dunn. 2000. Kebijakan publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep, Teori dan Isu (Ed.2, Cet.). (2008). Yogyakarta: Gava Media.
- Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik, Cetakan Kedua, Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S. 2011. Jejaring Kebijakan Publik: Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit: Media Pressindo.

### Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 pasal 2 ayat 6 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 2025.

Surat Keputusan Walikota Semarang No. 556/819 tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata Kota Semarang.

### Jurnal

Adisusilo, J.R.S. 2013. Pembelajaran Nilai – Karakter, Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Arafat, Shendy Yasmin, Budi Puspo Priyadi, And Amni Zakarsyi Rahman. 2022. "Analisis Peran Aktor Dalam Pengembangan Obyek Wisata Umbul Susuhan Di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten." *Journal Of Public Policy And Management Review* 11.3: 373-395.

Bellastuti, Damaris Bernike, and Tri Yuniningsih. *Analisis Jaringan Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang/52/Adm. Publik/2022*. Diss. Faculty of Social and Political Science, 2020.

Destiana, Riska, Kismartini Kismartini, and Tri Yuningsih. 2020. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau

- Penyengat Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 8.2: 132-153.
- Fifiyanti, Debby, and Janianton Damanik. 2021. "Pemetaan Peran Dan Kontribusi Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Ekowisata Desa Burai." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10.3: 448-462.
- Ginting, G., Kismartini, K., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2022). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar. *PERSPEKTIF*, 11(1), 8-15.
- Handayani, Fitri, and Hardi Warsono. 2017. "Analisis peran *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang." *Journal of Public Policy and Management Review* 6.3: 40-53.
- Hariyanto, Hariyanto. 2020. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3.2: 99-115.
- Herdiana, Dian. 2019. "Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 6.1: 63-86.
- Kusuma, S. D., Nurcahyanto, H., & Marom, A. 2022. Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Dengan Menggunakan Kerangka Pentahelix. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 422-439.
- Nugraha, Rina. 2020. *Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Umbul Pongok Kabupaten Klaten*. Diss. Universitas Airlangga.
- Nugroho, Annatasya Yunita, Amni Zarkasyi Rahman, and Kismartini Kismartini. 2022. "Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 11.2: 315-335.
- Salsabila, Tsuraya Annisa, and R. Slamet Santoso. 2018. "Analisis *Stakeholders* (Aktor Kebijakan) Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo Di Kabupaten Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 7.2: 446-461.
- Yuningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. 2019. Model pentahelik dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84-93.

#### Internet

<https://muria.tribunnews.com/2023/01/23/patok-target-pemkot-yakin-72-juta-wisatawan-berkunjung-ke-semarang#:~:Perintah%20Kota%20Semarang%20menargetkan%20%20juta%20pada%202023>. (Diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 14.55)

<https://jatengprov.go.id/publik/kunjungan-wisata-nusantara-di-jateng-lebih-target/> (diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14.46)

<https://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/1656301445BUKU-STATISTIK---JAWA-TENGAH-DALAM-ANGKA-2021.pdf> (diakses pada tanggal 29 Januari 2023)